

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Gerakan Sosial Baru

Teori gerakan sosial modern memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari pendekatan sebelumnya. Pertama, teori ini memandang aktivitas gerakan sosial bukan sebagai perilaku irasional, melainkan sebagai sebuah aksi kolektif yang rasional dan konstruktif dalam masyarakat. Kedua, teori ini melakukan rekontekstualisasi dan penyempurnaan terhadap teori-teori klasik agar lebih relevan dengan dinamika kekinian. Ketiga, perkembangan studinya ditandai dengan meluasnya riset-riset empiris di berbagai belahan dunia di luar Amerika Utara dan Eropa Barat, sehingga memperkaya khazanah kajian gerakan sosial dengan perspektif yang lebih global dan inklusif. Keempat, secara substantif, teori modern berhasil mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memfasilitasi kemunculan, menentukan kekuatan, dan memengaruhi tingkat keberhasilan suatu gerakan sosial (Situmorang, 2013).

Secara tipologis Menurut Buechler (1995), secara umum teori-teori Gerakan Sosial Baru (GSB) dapat dikelompokkan ke dalam dua versi (tipe) yang berbeda, yakni versi politik (*political versions*) dan versi kultural (*cultural versions*). Perbedaan kedua versi ini tidak bersifat eksklusif, akan tetapi lebih sekedar pemahaman tentang perbedaan posisi dan beberapa dimensi tertentu saja (Sukmana, 2016).

Pandangan versi politik tentang GSB secara umum lebih berorientasi pada makro (*macro oriented*) dan secara khusus lebih berorientasi pada negara. Versi ini meyakini peran konstituen-konstituen baru dalam aktivitas sosial yang berbasis ras, gender, nasionalitas, atau karakteristik lainnya, tetapi juga tidak mengabaikan potensi gerakan berbasis kelas atau berbasis pekerja (*worked based*). Versi politik memandang suatu potensi untuk perubahan proaktif dan progresif jika ada kedekatan koalisi dan aliansi antara gerakan berbasis kelas dan berbasis non kelas dapat dipadukan. Versi politik mengkritik tentang sifat apolitik dari gerakan sosial baru yang lebih berorientasi kultural, di mana perspektif ini akan melihat sebagai membatasi potensi mereka untuk menghasilkan perubahan yang bermakna. Versi politik memiliki kemungkinan besar untuk mengidentifikasi basis sosial dari gerakan sosial baru dalam terminologi kelas melalui upaya membangun kompleksitas teori tentang struktur kelas kontemporer dan lokasi-lokasi yang bertentangan sebagai latar bagi aktivitas sosial (Sukmana, 2016).

Kedua, versi kultural mengklaim tentang hubungan antara struktur sosial dan bentuk gerakan dengan menekankan sifat desentralisasi baik kekuasaan maupun resistensi. Dengan demikian, hal ini tidak secara khusus berorientasi makro atau berpusat pada negara tetapi difokuskan kepada kehidupan sehari-hari, masyarakat sipil, dan membangun ruang bebas antara negara dan masyarakat sipil. Versi kultural berpendapat menolak label politik yang seringkali menyerang gerakan kulturalis melalui argumentasi bahwa gerakan politik adalah mudah untuk dikooptasi dan kekuatan gerakan pada medal simbolik dapat berbuat lebih banyak

mengekspos bentuk kontemporer dari kekuasaan daripada gerakan politik konvensional (Sukmana, 2016).

Gerakan sosial baru merupakan fenomena yang lahir dari dinamika konflik sosial modern dan memiliki karakteristik yang berbeda dari gerakan sosial klasik. Gerakan ini melibatkan partisipan yang beragam secara usia, gender, orientasi seksual, maupun profesi, serta tidak lagi menjadikan ideologi sebagai pemersatu, melainkan identitas dan nilai-nilai kultural yang mendorong reformasi institusi demi meningkatkan partisipasi publik dan mendorong demokratisasi kehidupan. Fokus utamanya banyak berkaitan dengan isu-isu kultural dan identitas, seperti kepercayaan, simbol, dan nilai yang menjadi dasar solidaritas. Hubungan antarindividu maupun kelompok dalam gerakan ini cenderung tidak terstruktur dan fleksibel, bahkan sering berbentuk aksi personal seperti gerakan hak perempuan atau LGBT (Suharko, 2006).

Gerakan sosial baru muncul sebagai respons terhadap perubahan bentuk gerakan sosial kontemporer di negara-negara Barat yang dipengaruhi oleh perkembangan era pasca-modern atau pasca industri. Perubahan struktur sosial dan peradaban Barat mendorong munculnya karakteristik baru dalam gerakan sosial yang berbeda dari gerakan klasik atau tradisional. Jika gerakan sosial lama lebih berfokus pada tujuan ekonomi dan material, seperti yang terlihat dalam gerakan buruh pada masa industrialisasi Eropa dan Amerika Serikat abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang bahkan melahirkan partai buruh dan partai komunis, maka gerakan sosial baru lebih menitikberatkan pada tujuan non-material. Fokus utama gerakan sosial baru terletak pada perubahan gaya hidup dan budaya dari pada tuntutan

kebijakan publik atau ekonomi, sebagaimana tampak pada gerakan lingkungan, anti-perang, perdamaian, feminisme, dan gerakan sejenis lainnya (Suharko, 2006).

Hal ini berbeda dengan konsep gerakan sosial lama secara umum, kajian gerakan sosial dalam tradisi klasik berakar pada teori-teori psikologi sosial. Menurut Rajendra Singh, hal ini menjadi ciri khas utama dari perspektif gerakan sosial klasik, meskipun kemudian mengalami perluasan dalam tradisi neoklasik. Inti dari pendekatan klasik terletak pada pandangan bahwa studi mengenai perilaku kolektif (*collective behavior*) berfokus pada berbagai bentuk tindakan massa atau kerumunan (*crowd*), yang sering dipersepsikan sebagai kolektivitas yang tidak terkendali, emosional, bahkan irasional. Dalam perspektif ini, fenomena seperti kerusuhan (*revolts*), huru-hara (*mob*), keributan dan kegelisahan sosial (*riots*), hingga pemberontakan (*rebels*) menjadi objek utama kajian, terutama di kalangan psikolog sosial dan sejarawan Barat sebelum tahun 1950-an (Rusmanto, 2013).

Titik berat gerakan sosial baru lebih menyoroti pada dimensi identitas, dengan fokus pada isu-isu simbolik dan kultural yang berkaitan dengan pembentukan dan penguatan identitas, dari pada sekadar persoalan ekonomi sebagaimana yang umum diperjuangkan oleh gerakan kelas. Umumnya, gerakan ini berlandaskan pada seperangkat nilai, keyakinan, simbol, serta makna universal yang mencerminkan rasa solidaritas dan ikatan emosional terhadap kelompok sosial tertentu (Wiktorowicz, 2007).

Gerakan sosial baru pada dasarnya merupakan hasil atau konsekuensi langsung dari berkembangnya sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi kesetaraan, kebebasan berekspresi, serta partisipasi aktif warga negara dalam

kehidupan sosial dan politik. Dalam sistem yang demokratis, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyuarakan kepentingan, aspirasi, dan identitas mereka melalui berbagai bentuk gerakan kolektif. Di Indonesia, momentum Reformasi tahun 1998 menjadi fondasi penting yang menandai perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial, sekaligus membuka jalan bagi tumbuhnya tradisi demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Dari titik inilah, berbagai gerakan sosial baru mulai bermunculan sebagai ekspresi dari kebebasan sipil dan tuntutan masyarakat terhadap perubahan, keadilan, serta pengakuan atas hak-hak yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Muliono dan Nasuhaidi, 2024).

Charles Tilly mendefinisikan gerakan sosial sebagai serangkaian interaksi berkelanjutan antara otoritas dengan para penentangannya yang membuat tuntutan-tuntutan berdasarkan kepentingan konstituen dengan preferensi tertentu. Dalam kerangka ini, Tilly mengajukan konsep "repertoar" untuk mengidentifikasi berbagai bentuk tindakan perlawanan kolektif yang digunakan oleh kelompok-kelompok untuk menyampaikan klaim mereka (Gesti Setyo Hadi dkk, 2025).

Repertoar pertikaian atau sering disebut juga repertoar aksi kolektif merujuk pada keseluruhan perangkat cara yang dimiliki suatu kelompok untuk mengajukan berbagai jenis klaim kepada berbagai individu atau otoritas. Hal ini adalah serangkaian alat, strategi, teknik, dan modalitas pertikaian yang digunakan dalam aktivitas protes dalam konteks spasio-temporal, diskursif-historis, dan institusional tertentu (Gesti Setyo Hadi dkk, 2025). Tilly sendiri mendefinisikannya sebagai serangkaian cara atau strategi yang digunakan untuk memperlihatkan perlawanan terhadap suatu fenomena dan atau kebijakan tertentu (Chowdhury,

2024). Analogi yang sering digunakan adalah "nyanyian" gerakan yang selalu digaungkan dalam setiap aksi protes. Konsep ini pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja untuk mengidentifikasi berbagai bentuk tindakan perlawanan dan sebagai cara untuk menyampaikan tuntutan yang digunakan oleh kelompok subordinat, seringkali melalui inovasi strategi dan taktik yang pernah dilakukan sebelumnya (Syawaludin, 2017).

Dalam menganalisis fenomena gerakan sosial, Tilly memandangnya sebagai perpaduan dari tiga elemen kunci yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berfungsi sebagai perangkat analitis untuk memahami kompleksitas gerakan. Sejumlah literatur menegaskan bahwa Tilly melihat gerakan sosial sebagai kesatuan antara sebuah kampanye, repertoar aksi, dan etalase WUNC (Gesti Setyo dkk, 2025).

Menurut Charles Tilly, gerakan sosial terdiri dari tiga unsur utama yang saling melengkapi yaitu kampanye, repertoar aksi, dan etalase *Worthiness, Unity, Numbers*, dan *Commitment* (WUNC). Kampanye merupakan upaya klaim kolektif yang bersifat publik, terarah, dan berkelanjutan sehingga menjadi pusat pengorganisasian gerakan. Repertoar aksi merujuk pada taktik dan strategi yang tersedia bagi kelompok dalam konteks waktu tertentu, mulai dari kerusuhan pra-modern, pemogokan dan demonstrasi di era modern, hingga repertoar digital seperti hacktivism pada masa kini. Sementara itu, etalase WUNC yang menampilkan *Worthiness, Unity, Numbers*, dan *Commitment* menjadi cara gerakan menunjukkan legitimasi, kekuatan, serta tingkat komitmen partisipannya. Ketiga elemen ini

bersama-sama menjelaskan bagaimana gerakan sosial dibentuk, dipraktikkan, dan diperjuangkan di ruang publik.

Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai wujud perlawanan atau oposisi politik yang muncul di tengah masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur yang memiliki pengaruh serta kapasitas untuk mengkonsolidasikan kekuatan berdasarkan tujuan kolektif. Gerakan ini diarahkan untuk menentang elit, penguasa, maupun pihak-pihak lain yang dipandang berpotensi mengancam stabilitas dan tatanan sosial masyarakat (Tarrow, 1993).

Sidney Tarrow menyatakan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan rasa solidaritas yang sama. Gerakan ini muncul melalui proses interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elit, pihak berkuasa, atau kelompok lain yang dianggap sebagai oposisi. Menurut Tarrow, gerakan sosial memiliki beberapa ciri penting: (a) melakukan aksi yang bersifat mengganggu atau menantang terhadap penguasa, elite, kelompok tertentu, atau norma budaya yang ada; (b) dilandasi oleh tuntutan bersama yang ditujukan kepada pihak berwenang atau lawan; (c) berpijak pada identitas kolektif dan solidaritas di antara para anggotanya; serta (d) terus melakukan aksi kolektif secara berkelanjutan hingga berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisir (Tarrow, 1993).

Dalam menganalisis dinamika gerakan sosial, Tarrow mengemukakan lima tahapan yang berkaitan dengan munculnya aksi gerakan sosial. Pertama, *heightened conflict*, yakni fase ketika ketegangan sosial meningkat akibat munculnya permasalahan dalam sistem sosial, baik di sektor industri, pedesaan, maupun

institusi pendidikan. Kedua, *geographic and sectoral diffusion*, yaitu proses penyebaran gagasan atau semangat gerakan dari wilayah pusat konflik (*central*) ke daerah lain (*peripheral*), sehingga memicu terjadinya gelombang protes yang lebih luas dan masif. Ketiga, *social movement organizations*, yaitu tahap terbentuknya organisasi atau wadah yang berfungsi untuk merancang strategi serta mengarahkan tujuan gerakan agar lebih terorganisir. Keempat, *new frames of meaning*, yakni munculnya kerangka pemaknaan baru atau ideologi yang lahir dari pengalaman gerakan sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemahaman terhadap realitas sosial yang dihadapi. Kelima, *expanding repertoires of contention*, yang menggambarkan proses perluasan bentuk-bentuk perlawanan dan strategi aksi yang digunakan oleh gerakan sosial dalam menantang kekuasaan (Irawan dkk., 2022).

Charles Tilly dan Sidney Tarrow sama-sama melihat gerakan sosial sebagai proses kolektif yang melibatkan interaksi berkelanjutan antara kelompok penantang dan pihak berwenang, namun keduanya menekankan aspek yang berbeda. Tilly menekankan tiga elemen fundamental kampanye, repertoar aksi, dan etalase (WUNC) sebagai kerangka inti untuk memahami bagaimana gerakan sosial membangun klaim, memilih strategi, serta menampilkan legitimasi dan komitmen di ruang publik. Sementara itu, Tarrow lebih fokus pada dinamika mobilisasi dan perkembangan gerakan, dengan menyoroti gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang lahir dari solidaritas, tujuan bersama, serta interaksi berkesinambungan dengan elit atau kelompok dominan. Ia juga menekankan proses konflik melalui lima tahap utama, mulai dari meningkatnya konflik, difusi geografis, pembentukan organisasi gerakan, kemunculan kerangka makna baru,

hingga ekspansi repertoar aksi. Dengan demikian, Tilly lebih menekankan struktur dan unsur pembentuk gerakan, sedangkan Tarrow menekankan dinamika, proses mobilisasi, dan tahapan perkembangan gerakan.

Dalam konteks gerakan Almuntaq dan penolakannya terhadap konser Ruang Bermusik 2025, gagasan Sidney Tarrow lebih relevan dibandingkan kerangka Charles Tilly karena mampu menjelaskan dinamika kemunculan, mobilisasi, serta eskalasi aksi yang terjadi secara cepat dan berbasis solidaritas lintas organisasi Islam. Gerakan Almuntaq tidak hanya menampilkan klaim atau strategi aksi tertentu, tetapi berkembang melalui proses peningkatan ketegangan moral di masyarakat, penyebaran isu secara meluas di media sosial dan jaringan pesantren, pembentukan koordinasi antarorganisasi, serta munculnya kerangka pemaknaan baru tentang ancaman budaya populer terhadap moralitas. Tahapan-tahapan ini sejalan dengan konsep Tarrow mengenai *heightened conflict*, difusi gerakan, pembentukan organisasi gerakan, hingga ekspansi repertoar protes. Sementara kerangka Tilly lebih cocok untuk menganalisis struktur kampanye dan bentuk taktik tertentu, teori Tarrow memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Almuntaq bergerak, menyatukan solidaritas, dan memobilisasi aksi dalam momentum yang cepat serta reaktif terhadap isu moral yang berkembang.

Analisis mengenai pola mobilisasi dan eskalasi gerakan sebagaimana dijelaskan melalui kerangka Sidney Tarrow perlu dilengkapi dengan pemahaman mendalam mengenai aspek internal yang mempersatukan para aktor di dalamnya. Di balik strategi difusi isu dan pemanfaatan momentum politik, terdapat elemen identitas kolektif yang berfungsi sebagai perekat sosiologis antar anggota gerakan.

Dalam kasus Almutaz dan penolakannya terhadap konser Ruang Bermusik 2025, identitas kolektif ini menjadi basis yang memungkinkan terjadinya koordinasi lintas organisasi secara organik. Membedah konstruksi identitas kolektif menjadi langkah krusial untuk memahami bagaimana solidaritas dalam gerakan ini terbangun dan bertahan di tengah dinamika sosial yang kompleks.

Identitas merujuk pada ciri khas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kategori sosial tertentu. Istilah ini berasal dari kata *idem* dalam bahasa Latin yang berarti “sama”, sehingga identitas mencerminkan adanya kesamaan atau kesatuan dengan pihak lain dalam konteks tertentu. Namun, identitas tidak hanya berbicara tentang kesamaan, tetapi juga mencakup aspek perbedaan. Artinya, identitas dapat dipahami sebagai karakteristik yang membedakan satu individu atau kelompok dari individu atau kelompok lainnya. Dengan demikian, identitas mengandung dua dimensi utama yaitu persamaan dan perbedaan. Dimensi persamaan muncul ketika seseorang memiliki kesamaan tertentu dengan anggota kelompoknya, sedangkan dimensi perbedaan tampak ketika ciri khas tersebut menjadi pembeda dari kelompok lain (Santoso, 2006).

Secara terminologi, kata identitas memiliki banyak makna atau arti. Sehingga secara umum bisa dimaknai bahwa identitas seseorang adalah siapa orang tersebut (*who a person is*). Maka jika itu seseorang itu Muslim, Islam adalah identitasnya. Pun jika ia orang Sunda, maka Sunda merupakan identitasnya. Dengan kata lain, identitas pada kelompok juga diartikan sebagai siapa kelompok tersebut (*who a group are*). Singkatnya, identitas dapat kita pahami sebagai ciri-ciri fisik atau

kualitas yang membuat seseorang atau sekelompok orang yang membuat mereka berbeda atau unik dari yang lain (Sulaeman, 2022).

Secara konsep tentang diri, identitas itu merupakan suatu ciri yang melekat dalam diri seseorang dan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki kekhasan masing-masing. Dalam konteks kelompok, identitas kelompok itu dapat dikenali dari adanya kesamaan ciri pada anggota kelompoknya. Kesamaan ciri tersebut bisa melekat dalam banyak hal, baik fisik maupun non fisik. Misalkan cara berpakaian, bahasa, adat istiadat, jenis rambut, warna kulit, budaya, etnis, ras, agama, *interest groups*, partai politik, dan lain-lain (Sulaeman, 2022).

Selain itu, Menurut Jary dan Jary (1991) konsep identitas dipahami sebagai rasa akan diri sendiri yang terbentuk ketika seseorang mulai membedakan dirinya dari orang tua dan keluarga, lalu menempatkan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini merujuk pada pemahaman serta gambaran yang dimiliki individu mengenai siapa dirinya dan aspek-aspek apa yang dianggap paling penting dalam dirinya. Sumber-sumber identitas tersebut dapat mencakup unsur seperti kebangsaan, etnisitas, gender, orientasi seksual (baik heteroseksual, homoseksual, maupun biseksual), serta kelas sosial. Meskipun identitas dimiliki oleh individu, pembentukannya tidak terlepas dari kelompok sosial tempat ia menjadi bagian dan yang menjadi dasar rujukan dalam proses identifikasinya. Perlu dipahami bahwa sering kali terdapat perbedaan antara cara seseorang memandang dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihatnya (Rahmaniah, 2012).

Tabel 2. 1 Tabel Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Identitas

No	Faktor Pengaruh	Keterangan
1	<i>Legitimizing Identity</i>	Pada tahap ini, institusi (penguasa) membangun dominasi identitas dalam kehidupan sosial. Dominasi ditunjukkan oleh institusi ini dengan cara meletakkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.
2	<i>Resistance Identity</i>	Identitas pada tahap ini aktor-aktor sosial punya peran besar dalam peletakannya. Peletakan identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas yang lain.
3	<i>Project Identity</i>	Bentuk identitas pada jenis ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan maksud untuk membentuk identitas baru guna bisa mencapai posisi-posisi tertentu dalam masyarakat. Kondisi ini dapat terjadi sebagai akibat dari gerakan sosial yang muncul dan dapat mengubah struktur sosial.

Sumber: (Sulaeman, 2022)

Sheldon Stryker menyatakan bahwa identitas adalah teori yang memusatkan perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar lagi (masyarakat). Dalam teori ini individu dan masyarakat dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Seseorang dibentuk oleh interaksi, namun struktur sosial membentuk interaksi. Identitas juga menurut Stryker berasal dari interaksionisme simbolik dan lain-lain, serta di atas spesifikasi formula yang mengekspresikan kerangka dasar (Sulaeman, 2022).

Sedangkan Henri Tajfel menyatakan bahwa identitas merupakan bagian dari konsep diri individu yang bersumber dari pengetahuannya tentang keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial bersama-sama dengan makna emosional atau nilai yang melekat pada keanggotaan itu. Identitas sosial terkait dengan keterlibatan, rasa

peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu. Menurut teori ini, nilai kolektif yang biasanya dilestarikan dalam organisasi sosial tertentu merupakan manifestasi dari apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan individu, yang merupakan bagian dari kelompok sosial tersebut. Identitas tersebut merupakan identitas kolektif yang mensyaratkan masing-masing anggota kelompok sosial tersebut untuk saling mengenal dan memiliki hubungan sosial yang dekat (Sulaeman, 2022).

Jika dilihat dari dua gagasan tersebut, identitas pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan bagaimana individu memandang dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana ia membangun makna melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Identitas terbentuk melalui proses yang berlangsung terus-menerus, dipengaruhi oleh norma, peran, dan nilai yang ada di masyarakat, sekaligus diperkuat oleh kesadaran akan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Dalam proses ini, identitas tidak bersifat statis, melainkan senantiasa dinegosiasikan sesuai dengan konteks sosial, hubungan antarmanusia, dan pengalaman hidup yang dialami individu. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi landasan untuk melihat bagaimana identitas dapat meluas dari level individu menuju bentuk yang lebih kolektif dalam konteks kelompok atau komunitas.

Identitas kolektif dapat didefinisikan sebagai hasil dari proses interaksi dan berbagi pengalaman di antara individu maupun kelompok, yang kemudian mengarahkan orientasi mereka terhadap tindakan, peluang, serta berbagai batasan yang memengaruhi aksi tersebut. Dapat diuraikan bahwa terdapat tiga komponen utama identitas kolektif. Pertama proses yang mencakup pembentukan pemahaman

kognitif mengenai tujuan, strategi, dan ruang tindakan. Kedua, proses yang terbentuk melalui jaringan relasi aktif antaraktor, yang saling berinteraksi, berkomunikasi, mempengaruhi, bernegosiasi, serta membuat keputusan bersama termasuk di dalamnya struktur organisasi, kepemimpinan, dan saluran komunikasi. Ketiga adanya keterlibatan emosional yang memungkinkan individu merasa menjadi bagian dari suatu kesatuan kolektif (Johnson dan Klandermans, 2004).

Teori identitas kolektif menekankan bahwa gerakan sosial tidak semata-mata digerakkan oleh kepentingan material, melainkan lebih oleh perilaku ekspresif dan pengalaman subjektif para anggotanya. Dalam pendekatan ini, isu utama bukan hanya integrasi dan solidaritas, tetapi bagaimana partisipan memaknai aksi mereka sebagai wujud jati diri manusia secara utuh, bukan sekadar sebagai pembawa nilai-nilai kelas tertentu seperti buruh. Secara umum, gerakan berbasis identitas dipandang sebagai upaya manusia untuk mencari jati diri, otonomi, dan pengakuan. Identitas tersebut tidak dapat dibentuk melalui partisipasi tidak langsung, delegasi, atau perwakilan, melainkan hanya dapat muncul melalui interaksi kolektif yang nyata di antara para anggotanya (Pizzorno, 1978).

Pendekatan identitas kolektif menekankan bahwa gerakan sosial lebih banyak didorong oleh aspek-aspek nonmaterial dan ekspresif, dengan para anggotanya dipahami sebagai individu yang memiliki pemaknaan subjektif atas tindakan mereka. Meskipun tetap berkaitan dengan isu integrasi dan solidaritas, konsep ini melihat bahwa partisipan tidak bertindak sebagai pembawa kepentingan kelas tertentu, melainkan sebagai manusia yang berusaha menegaskan jati diri mereka secara utuh. Gerakan berbasis identitas dipandang sebagai wujud pencarian akan

identitas, otonomi, dan pengakuan. Identitas tersebut tidak dapat dihasilkan melalui partisipasi tidak langsung atau perwakilan, melainkan terbentuk melalui interaksi, keterlibatan, dan pengalaman kolektif yang nyata di dalam gerakan itu sendiri (Pizzorno, 1978).

Dalam perspektif gerakan sosial baru, identitas kolektif bukan sekadar elemen pendukung, melainkan esensi yang membentuk perasaan senasib, kesadaran akan musuh bersama, serta kesamaan visi yang melahirkan identitas "kita". Identitas ini tidak hanya menjadi penentu taktik dan keberhasilan suatu mobilisasi, tetapi sering kali diposisikan sebagai tujuan utama dari gerakan itu sendiri. Sebagai ilustrasi, dalam gerakan feminis, identitas bukan merupakan komoditas yang dapat dinegosiasikan karena ia melekat erat pada eksistensi para aktornya. Bagi mereka, terlibat dalam aksi kolektif adalah manifestasi nyata dari identitas subjektif mereka sebagai feminis. Dengan demikian, partisipasi dalam gerakan bukan hanya alat untuk mencapai target eksternal, melainkan bentuk aktualisasi diri dan penegasan identitas yang menjadi inti dari perjuangan tersebut (Hiariej, 2010).

Eksistensi dan logika aksi dari sebuah gerakan sosial hanya dapat dipahami secara utuh melalui pemahaman terhadap konstruksi "ke-kita-an" atau identitas kolektif yang mendasarinya. Dalam konteks gerakan Islam, setiap tindakan kolektif merupakan manifestasi dari kesatuan internal yang dibentuk melalui dua proses pemingkiaan utama. Pertama, pendefinisian batas-batas identitas antara diri kelompok (*in-group*) dan pihak yang dianggap sebagai lawan (*out-group*). Kedua, artikulasi terhadap problematika yang sedang dihadapi beserta tawaran solusinya. Kendati demikian, identitas kolektif ini tidak bersifat monolitik atau kaku. Adanya

divergensi pendapat dan potensi konflik internal di antara para aktor menunjukkan bahwa koherensi identitas dalam gerakan tersebut memiliki derajat fluiditas tertentu, yang senantiasa dinamis dan berkembang seiring dengan situasi yang dihadapi (Hiariej, 2010).

Dalam mengonstruksi identitas diri, aktor-aktor dalam gerakan Islam radikal menggunakan beragam atribusi simbolis, mulai dari penyematan identitas sebagai pengikut tradisi kenabian, *mujahidin*, hingga penggunaan istilah komunitas Islam yang murni. Meskipun terdapat variasi dalam penyebutan identitas tersebut, secara substantif muncul kecenderungan kuat bahwa mereka menempatkan diri dalam satu posisi sentral yang sama, yaitu sebagai representasi dari pembela Islam. Identitas sebagai "pembela" ini bukan sekadar label, melainkan kerangka pemaknaan yang memberikan legitimasi moral bagi mereka untuk bergerak dalam ruang publik, terutama ketika mereka mempersepsikan adanya ancaman terhadap nilai-nilai keagamaan (Hiariej, 2010).

Porta dan Diani menjelaskan bahwa hubungan antara aksi kolektif dan identitas kolektif bersifat kompleks. Menurut mereka, identitas tidak selalu harus merujuk pada sesuatu yang bersifat tetap seperti jenis kelamin, orientasi seksual, atau organisasi tertentu. Sebaliknya, identitas kolektif dapat terbentuk dari kesamaan nilai, sikap, pandangan hidup, gaya hidup, serta pengalaman yang dibangun melalui keterlibatan dalam aksi bersama. Nilai (*value*) dalam pandangan Porta dan Diani menjadi dasar penting terbentuknya identitas kolektif, karena nilai merupakan gagasan fundamental yang dipegang teguh oleh individu atau kelompok

dalam menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk (Sinaga dan Putra, 2021).

Porta dan Diani juga mengatakan bahwa salah satu unsur penting yang membentuk identitas kolektif adalah pandangan hidup. Pandangan hidup dapat dipahami sebagai seperangkat keyakinan, cara berpikir, nilai-nilai, dan sudut pandang yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam memahami, menilai, serta menafsirkan realitas yang ada di sekitarnya. Pandangan hidup tidak hanya mencerminkan bagaimana individu atau kelompok melihat dunia, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sikap, mengambil keputusan, dan menjalankan berbagai tindakan dalam kehidupan sehari-hari (Sinaga dan Putra, 2021).

Porta dan Diani dalam mengatakan bahwa identitas kolektif dapat diartikan sebagai rangkaian aksi protes terhadap isu-isu tertentu atau bahkan kampanye tertentu. Sebaliknya, proses gerakan sosial hanya terjadi ketika identitas kolektif berkembang melampaui kampanye dan inisiatif tertentu. Memiliki persamaan orientasi, komitmen, serta satu tujuan yang memungkinkan para aktivis atau organisasi menganggap diri mereka terkait erat dengan aktor lain, tidak harus identik namun pasti kompatibel dalam memobilisasi isu yang lebih luas (Amalia, 2024).

Dalam teori gerakan sosial, kekuatan dan ketahanan suatu gerakan sangat dipengaruhi oleh keberadaan identitas kolektif di antara para anggotanya. Porta dan Diani menegaskan bahwa identitas kolektif berperan penting sebagai dasar penyatuan makna dan arah perjuangan bersama dalam aksi sosial. Mereka

menjelaskan bahwa hubungan antara aksi kolektif dan identitas kolektif bersifat kompleks dan saling menguatkan aksi bersama dapat memperkuat identitas kolektif, sementara identitas kolektif juga menjadi pendorong bagi lahirnya aksi bersama. Berdasarkan tradisi kajian gerakan sosial, Porta dan Diani berpendapat bahwa identitas kolektif tidak selalu dibangun atas dasar kesamaan ras, kelas, etnis, atau gender, melainkan dapat muncul dari kesamaan orientasi nilai, sikap, pandangan hidup, gaya hidup, serta pengalaman yang dibentuk melalui keterlibatan dalam aksi-aksi bersama. Dengan kata lain, identitas kolektif menjadi landasan simbolik yang mengikat individu dalam suatu gerakan, sekaligus menjadi sumber motivasi dan solidaritas dalam memperjuangkan tujuan Bersama (Sinaga dan Putra, 2021).

Porta dan Diani (2020) mengemukakan bahwa gerakan sosial tidak hanya dipahami sebagai rangkaian aksi protes terhadap isu atau kampanye tertentu, tetapi sebagai sebuah proses ketika identitas kolektif tumbuh dan berkembang melampaui batas kampanye atas dasar inisiatif bersama. Identitas kolektif berperan penting dalam menciptakan rasa pengakuan dan keterhubungan di antara para aktor gerakan, yang menumbuhkan rasa, tujuan, serta komitmen bersama terhadap cita-cita yang diperjuangkan (Cahyono, 2018).

Porta dan Diani (2020) mengatakan melalui identitas kolektif, para aktivis dan organisasi merasa terikat satu sama lain, bukan karena kesamaan mutlak, melainkan karena adanya kompatibilitas dalam upaya memobilisasi isu-isu yang lebih luas. Dalam konteks ini, keterlibatan aktor baik individu maupun organisasi tidak semata-mata untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga sebagai bagian dari

proses perubahan sosial yang berupaya melakukan perlawanan terhadap struktur yang ada. Meski para aktor berbagi sumber daya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, hubungan tersebut tidak selalu melahirkan rasa kepemilikan jangka panjang; ketika konflik berakhir, warisan kolektif berupa identitas dan solidaritas sering kali tidak lagi menjadi kebutuhan utama (Amalia, 2024).

Dalam penelitian ini, Penulis menempatkan teori identitas kolektif Porta dan Diani untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, karena identitas kolektif Porta dan Diani menjelaskan bagaimana kesamaan nilai, pandangan hidup, pengalaman bersama, serta orientasi moral para anggota komunitas dapat membentuk solidaritas dan rasa keterhubungan yang melampaui sekadar aksi atau kampanye sesaat. Dalam konteks Almumtaz, dinamika gerakan tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap isu pembatalan penampilan musisi, tetapi sebagai proses pembentukan identitas kolektif yang muncul melalui interaksi, komunikasi, dan keterlibatan langsung para anggotanya. Perspektif Porta dan Diani memungkinkan penulis melihat bahwa kekuatan gerakan ini bersumber dari konstruksi makna bersama yang menegaskan siapa mereka, apa yang mereka perjuangkan, serta bagaimana kompatibilitas nilai di antara para aktor menjadi dasar mobilisasi yang lebih luas. Dengan demikian, teori identitas kolektif memberikan landasan analitis yang paling relevan untuk memahami bagaimana Almumtaz memaknai posisinya, membangun solidaritas, dan menegaskan identitas gerakan dalam ruang publik.

2.2. Aktivisme Islam Internasional, Nasional, dan Lokal

Pada awal abad ke-21 aktivisme islam terlihat jelas melalui gelombang besar demonstrasi di dunia muslim yang muncul sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat ke Afghanistan pada Oktober 2001. Serangan ini dilakukan setelah tragedi 11 September oleh al-Qaeda dan memicu kemarahan luas di berbagai negara. Meskipun konteks dan bentuk protes berbeda-beda, terdapat pola umum yang tampak di tahap awal perang tersebut. Banyak aksi protes besar terjadi setelah pelaksanaan salat dan khutbah Jumat di masjid. Misalnya, di Kenya sekitar 3.000 orang turun ke jalan setelah salat Jumat di masjid pimpinan Shaykh Ahmed Mussalam. Di Jakarta, sekitar 10.000 orang berarak dari Monumen Nasional menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat setelah salat Jumat, sementara di Kuala Lumpur sekitar 2.000 anggota Partai Islam Pan-Malaysia (PAS) melakukan hal serupa di depan Kedutaan Besar AS. Momen ibadah Jumat menjadi wadah penting bagi umat Islam untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka secara kolektif (Wiktorowicz, 2007).

Selain itu, gerakan protes tersebut umumnya dipelopori oleh organisasi-organisasi Islam. Meskipun banyak masyarakat tanpa afiliasi tertentu ikut serta, kelompok-kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Yordania, Partai Keadilan di Indonesia, serta *Jamiat Ulama-i-Islam* di Pakistan menjadi penggerak utama aksi-aksi tersebut. Bahkan, kelompok yang lebih radikal seperti Laskar Mujahidin di Indonesia turut aktif mengorganisir demonstrasi menentang pengeboman Amerika Serikat di Afghanistan. Protes-protes ini juga menjadi sarana untuk mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggap tidak adil

dan memanipulasi istilah “terorisme” demi kepentingan politiknya. Amerika digambarkan sebagai simbol ketidakadilan dan terorisme global, terutama karena dukungannya terhadap Israel dan serangannya yang menewaskan warga sipil di dunia Muslim. Spanduk-spanduk dalam berbagai bahasa memuat pesan seperti “Perang Salib terhadap Islam” dan “Bush adalah teroris terbesar.” Bahkan, di Nigeria Utara, tokoh ulama menyebut Amerika sebagai “negara teroris terbesar” karena agresinya terhadap negara-negara Muslim seperti Libya, Irak, dan Sudan (Wiktorowicz, 2007).

Dalam berbagai aksi tersebut, tampak adanya pola tindakan protes yang berulang atau *repertoar perseteruan*. Selain pawai dan demonstrasi besar, para aktivis juga mengirimkan petisi ke pemerintah dan parlemen, menggunakan spanduk berbahasa lokal maupun Inggris untuk menjangkau perhatian global, serta menampilkan simbol-simbol keagamaan seperti pembakaran bendera Amerika dan patung Presiden George Bush. Kekerasan yang terjadi dalam sebagian demonstrasi biasanya muncul sebagai reaksi terhadap tindakan aparat yang represif. Aktivisme Islam pada masa itu menunjukkan bagaimana solidaritas keagamaan dapat bertransformasi menjadi gerakan sosial global yang menentang hegemoni dan ketidakadilan internasional (Wiktorowicz, 2007).

Aktivisme islam berakar pada simbol, bahasa, dan sejarah budaya masyarakat muslim, sehingga memiliki daya resonansi yang kuat di tengah umat Islam, terutama mereka yang merasa terpinggirkan secara politik, mengalami kesulitan ekonomi, serta kehilangan kendali atas perubahan global yang serba cepat. Aktivisme ini berupaya membangun kerangka berpikir dan narasi yang mampu

memotivasi, menginspirasi, serta menumbuhkan loyalitas di kalangan pengikutnya. Namun, karena banyak gerakan Islam beroperasi dalam situasi yang penuh tekanan dan pembatasan politik, dinamika pembentukan wacana dan strategi mereka sering kali berbeda dengan gerakan sosial yang muncul di negara-negara demokrasi liberal Barat. Mengingat kajian mengenai aktivisme Islam dalam konteks dunia Muslim masih relatif baru, perbedaan tersebut menjadi ruang penting bagi penelitian empiris yang lebih mendalam (Wiktorowicz, 2007).

Aktivisme islam pada dasarnya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya unik, karena memiliki berbagai elemen yang serupa dengan gerakan sosial lain di berbagai belahan dunia. Unsur seperti struktur organisasi, pernyataan sikap, serta pembentukan identitas kolektif juga ditemukan dalam gerakan-gerakan sosial pada umumnya. Yang membedakan gerakan Islam adalah konteks politik tempat gerakan tersebut berkembang. Di banyak negara Timur Tengah, kekuasaan sering dipertahankan melalui praktik eksklusif dan represi politik, sehingga ruang partisipasi warga menjadi terbatas. Dalam kondisi demikian, masyarakat kemudian membentuk jaringan-jaringan informal sebagai sarana untuk berorganisasi dan membangun identitas kolektif. Pola inilah yang menjadikan gerakan Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan gerakan sosial lainnya (Wiktorowicz, 2007).

Dalam konteks Indonesia, aktivisme islam mulai terlihat secara luas setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Masa pasca-Suharto ini tidak hanya ditandai oleh munculnya berbagai aksi simbolik akan tetapi menyentuh pada ranah kekerasan. Hal ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan Islam politik, baik melalui

partai politik maupun organisasi keagamaan. Beberapa kelompok yang muncul pada periode ini antara lain Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Laskar Jihad (LJ). Organisasi-organisasi tersebut kerap membawa simbol-simbol Islam dalam kegiatan, wacana, dan aksi mereka di ruang publik. Tidak jarang, cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi bersifat konfrontatif dan bahkan disertai kekerasan. Puncak dari fase ini ditandai oleh terjadinya tragedi bom Bali pada tahun 2002, yang menjadi simbol ekstremnya kekerasan dalam gerakan berbasis keagamaan (Ashgar, 2015).

Fenomena kekerasan dalam aktivisme islam tersebut kemudian banyak dikaji dalam ranah diskursus religio-politik, khususnya melalui konsep radikalisme Islam. Selain istilah ini, muncul pula sejumlah istilah lain yang saling berkaitan seperti fundamentalisme, Islamisme, revivalisme, neo-fundamentalisme, post-Islamisme, dan aktivisme islam (*islamic activism*). Meskipun masing-masing istilah memiliki penekanan dan makna yang berbeda, semuanya merujuk pada satu fenomena besar, yaitu kebangkitan Islam politik di era reformasi (Ashgar, 2015).

Dalam konteks Almuntaq, pembahasan mengenai aktivisme islam menjadi penting untuk memahami karakter dan orientasi gerakan Almuntaq dalam konteks sosial-keagamaan di Kota Tasikmalaya. Sebagai aliansi yang berlandaskan nilai-nilai islam dan beroperasi dalam ruang publik, Almuntaq tidak dapat dilepaskan dari tradisi panjang aktivisme islam yang menempatkan agama bukan sekadar sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai landasan moral dan sumber legitimasi tindakan sosial.

Dalam pandangan konservatisme, aktivisme islam di Kota Tasikmalaya berkembang mulai tahun 1990. Berbagai peristiwa konservatisme islam yang menyudutkan kelompok minoritas seperti syiah dan ahmadiyah atau bahkan kelompok non-muslim terjadi dalam berbagai konteks. Kerusuhan Tasikmalaya tahun 1996 menjadi momentum munculnya kembali sentimen Islam politik di Indonesia. Peristiwa ini berawal dari insiden di Pesantren Riyadul Ulum Wadda'wah, ketika seorang santri yang merupakan anak polisi dihukum oleh guru ngajinya. Tak terima, sang ayah memanggil guru tersebut ke Polres Tasikmalaya, namun kabar yang beredar menyebutkan bahwa guru itu disiksa. Isu tersebut memicu kemarahan massa hingga ribuan orang turun ke jalan dan melakukan kerusakan terhadap kantor polisi, gereja, serta toko milik warga keturunan Tionghoa (Mudzakkir, 2017).

Kerusuhan ini juga dipengaruhi oleh sentimen ketidakadilan ekonomi. Masyarakat menilai pengusaha keturunan Tionghoa lebih diistimewakan dibanding pengusaha pribumi. Narasi tersebut bercampur dengan isu keagamaan dan memperkuat konflik sosial. Padahal, industri kecil milik pribumi, seperti konveksi dan bordir di Kawalu, masih berkembang sejak 1970-an. Hanya saja, ketergantungan terhadap bahan baku dari distributor Tionghoa membuat pengusaha lokal kerap merugi dan kehilangan aset, sehingga memperkuat kesan adanya ketimpangan ekonomi (Mudzakkir, 2017).

Dalam perspektif historis dan sosiologis, kemunculan gerakan Almumtaz di Tasikmalaya dapat dipahami sebagai bagian dari kesinambungan tradisi aktivisme islam yang memiliki keterhubungan dengan dinamika gerakan Islam di tingkat

internasional, nasional, dan lokal. Pada tataran ideologis, Almuntaaz mencerminkan kecenderungan gerakan Islam kontemporer yang menekankan pentingnya pelestarian nilai-nilai moral dan identitas keagamaan di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Dalam konteks nasional, pola gerakannya selaras dengan ekspresi aktivisme islam pasca-Reformasi yang memanfaatkan ruang publik untuk menyuarakan nilai-nilai keagamaan serta merespons persoalan sosial-politik. Sementara pada level lokal, keberadaan Almuntaaz memperlihatkan kesinambungan tradisi keislaman Tasikmalaya yang kuat dalam mengekspresikan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas sosial dan kultural.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai gerakan sosial telah memberikan wawasan penting, namun terdapat kesenjangan yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Penelitian Aksi Bela Islam 212 yang dipandang sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kegagalan sistem internasional melalui populisme kanan. Dengan menggunakan analisis framing, media dan aktor seperti GNPF-MUI dan FPI membentuk identitas kolektif umat melalui isu penistaan agama, yang kemudian memicu konsolidasi gerakan hingga lahirnya wacana 2019 Ganti Presiden (Riadi dan Drajat, 2019)

Penelitian mengenai Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) menunjukkan bahwa gerakan ini berhasil membangun identitas kolektif anti-pacaran sehingga menarik perhatian luas di kalangan pengguna internet. Melalui pendekatan kualitatif dengan teori mekanisme konstruksi identitas kolektif dari Porta & Diani, penelitian tersebut menemukan bahwa identitas gerakan dibentuk melalui tiga

mekanisme utama. Pertama, konstruksi identitas “kita” sebagai pejuang hijrah, mantan pelaku pacaran, pelindung kesucian perempuan, dan penerima hidayah. Kedua, interaksi antaraktivis melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp Group yang menumbuhkan rasa percaya dan solidaritas sosial. Ketiga, pembentukan ikatan emosional yang terbangun dari pengalaman bersama di masa lalu dan dikaitkan dengan tindakan kolektif saat ini (Rosyidah dan Damastuti, 2023).

Sementara itu, penelitian tentang hijrah Islami milenial bertujuan mendeskripsikan perkembangan hijrah sebagai perubahan diri ke arah yang lebih baik berlandaskan ajaran Islam. Menggunakan metode studi kepustakaan dan paradigma berorientasi identitas, penelitian ini melihat hijrah sebagai gerakan sosial baru yang menekankan keterlibatan aktor dan aksi kolektif. Hasilnya menunjukkan bahwa hijrah tercermin dari meningkatnya penggunaan hijab oleh publik figur, partisipasi dalam kajian keagamaan, berkembangnya industri busana muslim, serta peran media sosial dalam penyebaran dakwah. Selain itu, hijrah juga tampak dalam pola pikir kritis, perilaku religius, pencarian makna hidup, dan tujuan hidup yang lebih terarah (Fajriani, 2019).

Kemudian gerakan kolektif masyarakat Desa Lembobelala menolak klaim lahan oleh PTPN XIV menunjukkan bahwa konflik agraria ini berakar pada benturan hak atas tanah adat dengan klaim HGU perusahaan, yang memicu deprivasi relatif dan ketidakpuasan. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus dan analisis enam ciri aksi kolektif Neil J. Smelser, hasil penelitian mengungkap bahwa ketidaksesuaian legitimasi perusahaan dengan realitas penguasaan lahan serta janji

yang tidak terealisasi membentuk keyakinan kolektif akan perampasan hak. Pengiriman surat somasi menjadi pemicu mobilisasi melalui aksi massa, simbolik, advokasi, dan gerakan proaktif, sementara kontrol sosial dari perusahaan dan pemerintah terbatas efektivitasnya (Damantu dan Arief, 2025).

Penelitian tentang metamorfosis gerakan sosial di Banten menunjukkan perubahan signifikan dari era kolonial hingga reformasi, baik dari segi isu, aktor, maupun ideologi. Pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan, gerakan berfokus pada identitas dan ekonomi politik dengan aktor utama bangsawan, ulama, dan jawara yang berideologi pembebasan. Pada era Orla-Orba, isu bergeser pada ekonomi politik, agraria, dan pendidikan dengan karakter gerakan yang sporadis dan lemah secara ideologis. Sementara pada era reformasi, gerakan lebih terkoordinasi dan sistemik, menyoroti isu agraria dan lingkungan dengan aktor utama rakyat, *NGO* lokal, ulama, dan jawara, serta berlandaskan ideologi keadilan dan populisme (Alkhudri dkk., 2018).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, gerakan sosial dan aksi kolektif di Indonesia umumnya dikaji dalam ruang lingkup yang cukup luas, mulai dari ekspresi kekecewaan terhadap sistem politik dan isu keagamaan seperti Aksi Bela Islam 212, pembentukan identitas moral melalui gerakan indonesia tanpa pacaran dan fenomena hijrah milenial, hingga perlawanan terhadap ketidakadilan struktural seperti konflik agraria di Desa Lembobelala. Berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan identitas kolektif, pemingkanaan isu, serta keyakinan bersama menjadi faktor penting dalam mendorong mobilisasi masyarakat.

Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada gerakan berskala nasional atau isu besar yang melibatkan banyak aktor. Sementara itu, kasus seperti polemik Ruang Bermusik 2025 di Tasikmalaya memiliki lingkup yang lebih lokal, tetapi tetap menarik karena memperlihatkan dinamika identitas kolektif dan respons sosial terhadap perubahan budaya populer. Celah inilah yang menjadi dasar penelitian ini untuk menelaah bagaimana identitas, nilai sosial, dan aksi kolektif terbentuk dalam konteks gerakan lokal yang berakar pada dinamika budaya masyarakat.

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode yang digunakan	Teori yang digunakan	Fokus Penelitian
1	(Riadi and Drajat ,2019)	Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212	Kualitatif Studi Kasus	Identitas Kolektif Klandermans	Framing identitas kolektif aksi 212
2	(Rosyidah and Damastuti, 2023)	Membingkai Identitas Kolektif Berbasis Agama: Pengalaman Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran	Kualitatif Deskriptif	identitas kolektif dari Porta & Diani	konstruksi identitas kolektif anti pacaran dari gerakan Indonesia Tanpa Pacaran
3	(Fajriani, 2019)	Hijrah Islami Milenial Berdasarkan Paradigma	Studi kepustakaan	Gerakan Sosial Baru	Gerakan hijrah islami milenial yang berkembang

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode yang digunakan	Teori yang digunakan	Fokus Penelitian
		Berorientasi Identitas			sangat besar di Indonesia
4	(Damantu and Arief, 2025)	Gerakan Sosial Masyarakat: Aksi Kolektif Masyarakat Desa Lembobelala Dalam Menolak Klaim lahan Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Aksi Kolektif Neil J. Smelser	Menganalisis dinamika aksi kolektif berdasarkan enam ciri ciri aksi kolektif Neil J. Smelser
5	(Alkhudri, Dharmawan, dan Kinseng 2018)	Metamorfosis Gerakan Sosial Di Banten: Dari Romantisme Identitas Ke Isu Agraria Lingkungan	Kualitatif	Gerakan Sosial Baru	menganalisis metamorfosis gerakan sosial di Banten

2.4. Kerangka Pemikiran

Penolakan sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Almumtaz) terhadap kehadiran beberapa grup musik seperti Hindia dan Lomba Sihir pada Ruang Bermusik 2025 yang dianggap membawa simbolisme dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dan citra Kota Santri. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan adanya benturan antara

ekspresi budaya populer dengan nilai-nilai religius, tetapi juga memperlihatkan bagaimana identitas kolektif masyarakat digunakan sebagai dasar legitimasi gerakan sosial di ruang publik.

Dalam penelitian ini, teori gerakan sosial Sidney Tarrow digunakan sebagai fondasi awal untuk membaca dinamika aksi Almunta dalam polemik konser Ruang Bermusik 2025. Dalam konteks Tasikmalaya, Almunta membaca peluang politik berupa sensitivitas isu moral, dukungan jaringan religius, dan respons cepat elit lokal terhadap tekanan kelompok keagamaan. Kondisi ini memungkinkan Almunta melakukan mobilisasi yang lebih efektif melalui narasi ancaman budaya, sehingga gerakan mereka menjadi bagian dari pertarungan makna dan klaim di ruang publik yang melibatkan upaya mempengaruhi kebijakan dan opini masyarakat.

Selanjutnya, teori identitas kolektif memberikan penjelasan mengenai bagaimana Almunta dapat mengonsolidasikan solidaritas internal dan membingkai diri sebagai representasi moral Kota Santri. Identitas kolektif terbentuk melalui proses interaksi, komunikasi, dan negosiasi makna yang menciptakan kesadaran bersama mengenai siapa “kita” dan apa yang perlu diperjuangkan. Dalam kasus ini, Almunta memanfaatkan identitas religius Tasikmalaya sebagai landasan legitimasi, dengan menempatkan diri sebagai penjaga nilai-nilai kesantian dan memosisikan konser sebagai simbol masuknya budaya luar yang dianggap bertentangan dengan norma lokal. Identitas “Kota Santri” yang merupakan konstruksi historis-kultural kemudian direproduksi kembali untuk memperkuat klaim moral mereka di ruang publik. Dengan demikian,

kombinasi teori Tarrow dan identitas kolektif memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pandangan gerakan Almuntaaz baik dari aspek peluang politik dan mobilisasi, maupun dari aspek pembentukan makna dan solidaritas kelompok dalam menghadapi perubahan budaya di Tasikmalaya.

Gambar 2. 1 Gambar Kerangka Pemikiran

